



**RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMPANG 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahandari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu :

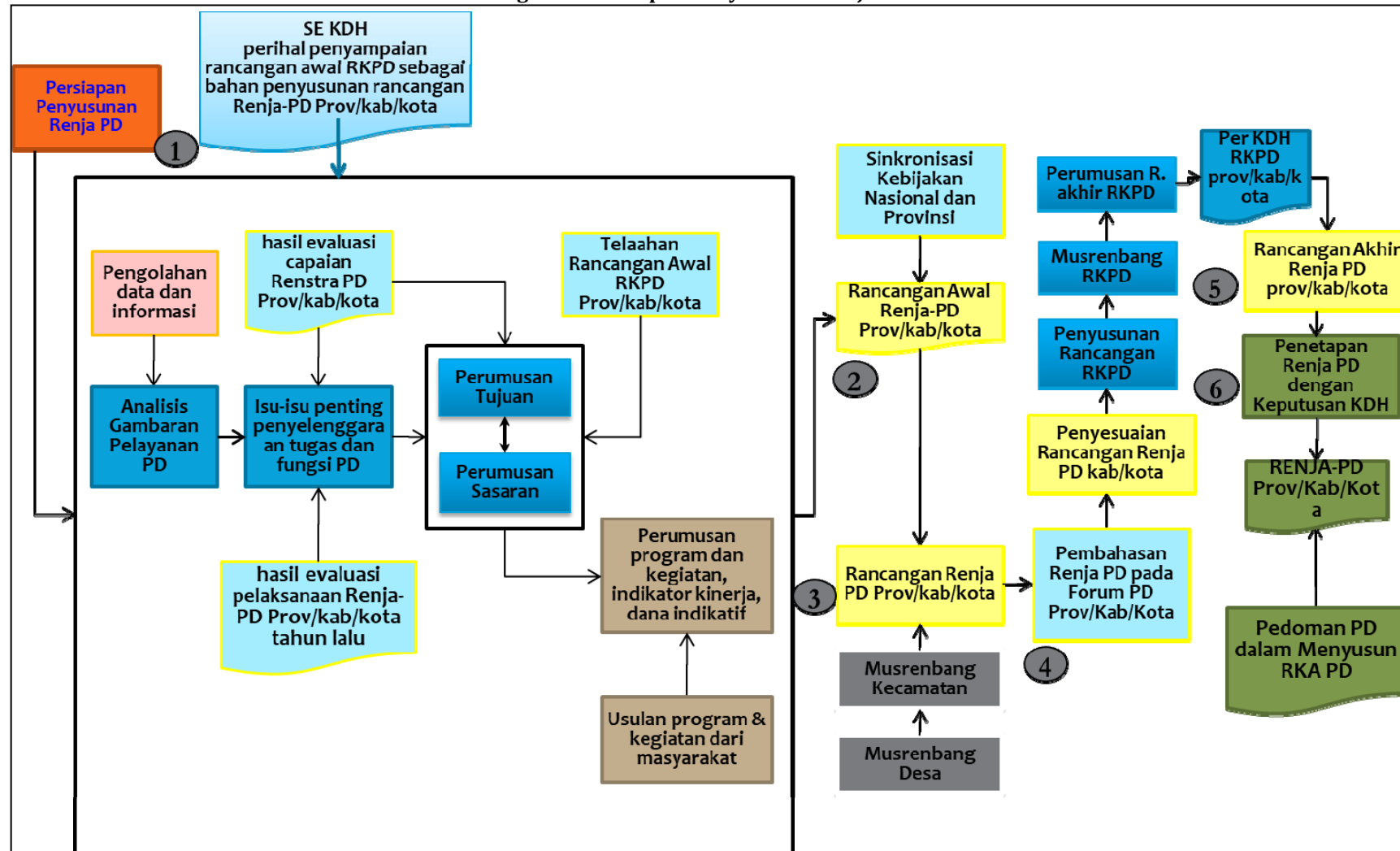
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**.

### **Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan



**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Operasional dan Belanja Modal beserta Program dan Kegiatannya.

**BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Sekretariat DPRD.

#### **Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2019**

Pada tahun anggaran 2019 Anggaran Sekretariat DPRD sebesar sebesar Rp. **38.410.423.927,00** (38 Milyar 410 Juta 423 Ribu 927 Rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. **18.832.493.147,00** (18 Milyar 832 Juta 493 Ribu 147 Rupiah) dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. **2.673.034.572,00** (2 Milyar 673 Juta 034 Ribu 572 Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. **16.870.640.008,00** (16 Milyar 870 Juta 640 Ribu 008 Rupiah) Dengan total realisasi sebesar Rp. **36.377.531.717,00** (36 Milyar 377 Juta 531 Ribu 717 Rupiah) atau **94,71%** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. **17.927.265.856,00** (17 Milyar 927 Juta 265 Ribu 856 Rupiah) dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. **2.650.556.084,00** (2 Milyar 650 Juta 556 Ribu 084 Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. **15.799.709.777,00** (15 Milyar 799 Juta 709 Ribu 777 Rupiah)

Anggaran belanja tidak langsung pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya dipergunakan belanja pegawai / personalia berupa gaji dan tunjangan baik anggota DPRD maupun pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung pos Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dibelanjakan untuk melaksanakan dan membiayai 6 program dengan 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang**

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/ Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	38.410.423.927,00	36.377.531.717,00	94,71				
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.539.783.919,00</b>	<b>20.577.821.940,00</b>	<b>95,53</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1. Pos DPRD	18.832.493.147,00	17.927.265.856,00	95,19	Gaji dan Tunjangan	14 kali	14 kali	100,00
	2. Pos Sekretariat DPRD	2.707.290.772,00	2.650.556.084,00	97,90	Gaji dan Tunjangan	14 kali	14 kali	100,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>16.870.640.008,00</b>	<b>15.799.709.777,00</b>	<b>93,65</b>				
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.716.909.593,00	4.552.028.702,00	96,50	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	96,25%	96,25
	1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.029.235.000,00	918.645.823,00	89,26	- Jumlah surat terkirim	5000 surat	4590 surat	91,80
					- Jumlah pelayanan listrik, air dan telepon	12 bln	12 bln	100,00
					- Jumlah asuransi gedung kantor (DPRD, Set. DPRD, dan rumah dinas ketua DPRD), Asuransi kendaraan dinas roda 4	12 bln	12 bln	100,00
					- Jumlah perpanjangan dan ganti STNK Roda 2 dan Roda 4	36 unit	28 unit	77,78
					- Jumlah jasa cleaning service	12 bln	8 bln	66,67
					- Jumlah honorarium tenaga keamanan DPRD	12 bln	12 bln	100,00
	2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	509.589.593,00	505.033.157,00	99,11	- Jumlah alat tulis kantor yang keluar	2317 bh	2256 bh	97,37
					- Jumlah cetak dan penggandaan	180910 lbr	179558 lbr	99,25
					- Jumlah alat listrik dan elektronika	973 bh	971 bh	99,79
					- Jumlah dokumentasi, dekorasi, dan publikasi	164 bh	164 bh	100,00
					- Jumlah Mamin Rapat dan mamin tamu	14366 ok	14359 ok	99,95
					- Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1554 ok	1554 ok	100,00
	3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	3.178.085.000,00	3.128.349.722,00	98,44	- Jumlah perdin dalam daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD	1564 oh	1564 oh	100,00
					- Jumlah perdin luar daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD	1562 oh	1562 oh	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.384.250.050,00	1.346.734.875,00	97,29	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100,00
	1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	281.168.650,00	278.544.000,00	99,07	Jumlah gedung Sekret. DPRD dan DPRD yang terpelihara	6 gedung selama 12 bln	6 gedung selama 12 bln	100,00
	2. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	72.912.450,00	72.812.450,00	99,86	Jumlah rumah dinas ketua DPRD dan mess DPRD yang terpelihara	2 gedung selama 12 bln	2 gedung selama 12 bln	100,00
	3. Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	370.800.000,00	366.483.725,00	98,84	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (servis, ganti suku cadang, pelumas kendaraan dan pemenuhan BBM)	12 unit roda 4 selama 12 bln	12 unit roda 4 selama 12 bln	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	284.568.300,00	256.203.200,00	90,03		100%	100,00%	100,00
					- Jumlah pengadaan peralatan kantor	5 unit	5 unit	100,00
					- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	100,00
					- Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	58 unit	58 unit	100,00
					- Jumlah meubelie yang terpelihara	1 paket selama 12 bln	1 paket selama 12 bln	
	5. Pengadnan Pakaian Dinas	374.800.650,00	372.691.500,00	99,44	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD	270 stel	270 stel	100,00
	<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>295.975.000,00</b>	<b>267.639.200,00</b>	<b>90,43</b>	<b>Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1. KegiPelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/seminar	295.975.000,00	267.639.200,00	90,43	- Jumlah pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar PNS			
					bimtek PNS	10 PNS	10 PNS	100,00
					ASDEKSI	21 ok	21 ok	100,00
	<b>4 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>45.905.660,00</b>	<b>43.577.000,00</b>	<b>94,93</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	15.375.820,00	14.932.000,00	97,11	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	100,00
					- Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	100,00
					- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	1 dok	100,00
					- Jumlah penyusunan SAKIP dan LKJIP	2 dok	2 dok	100,00
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	14.829.840,00	13.010.000,00	87,73	Jumlah RKA, DPA, Renja dan Renstra	4 dok	4 dok	100,00
	3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	15.700.000,00	15.635.000,00	99,59	Jumlah partisipasi pawai dan pameran yang diikuti	2 kl	2 kl	100,00
	<b>5 Program Fasilitasi persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>8.604.680.805,00</b>	<b>7.950.521.500,00</b>	<b>92,40</b>	<b>- Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>91,93%</b>	<b>91,93</b>
					<b>- Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00</b>
					<b>- Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1. Fasilitasi Rapat dan Risalah	290.850.000,00	284.850.000,00	97,94		100%	97,96%	97,96
					Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	49 kl	48 kl	97,96
	2. Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan	1.198.160.000,00	991.424.000,00	82,75		100%	85,90%	85,90
					Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan yang difasilitasi	688 kl	591 kl	85,90
	3. Fasilitasi Layanan Aspirasi Masyarakat	998.555.025,00	881.225.000,00	88,25		100%	75,00%	75,00
					- Jumlah penjarangan aspirasi masyarakat	3 kl	2 kl	66,67
					- Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Anggota DPRD	24 kl	20 kl	83,33
	4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	2.294.915.780,00	1.974.078.200,00	86,02		100%	100,00%	100,00
					- Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek	6 kl	6 kl	100,00
					- Jumlah asuransi kesehatan Anggota DPRD	1 kl	1 kl	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Fasilitasi study banding DPRD	3.822.200.000,00	3.818.944.300,00	99,91	Jumlah study banding yang terfasilitasi	100%	100,00%	100,00
					komisi	2 kl	2 kl	100,00
					bapemperda	2 kl	2 kl	100,00
					banggar	2 kl	2 kl	100,00
					BK	2 kl	2 kl	100,00
					banmus	1 kl	1 kl	100,00
					pansus	2 kl	2 kl	100,00
					panja	2 kl	2 kl	100,00
	<b>6 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>1.822.918.900,00</b>	<b>1.639.208.500,00</b>	<b>89,92</b>	<b>Persentase perda inisiatif DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72</b>
	1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	811.433.800,00	792.615.000,00	97,68	Jumlah penyusunan perda yang difasilitasi	4 perda	4 perda	100,00
	2. Dokumentasi dan publikasi	722.748.000,00	587.777.500,00	81,33		100%	99,17%	99,17
					- Jumlah koran yang keluar	696 eks	696 eks	100,00
					- Jumlah publikasi keg. DPRD	144 kl	99 kl	68,75
					- Jumlah cetak buletin	3600 eks	3600 eks	100,00
					- Jumlah profil DPRD	500 eks	500 eks	100,00
					- Jumlah cetak kalender	500 eks	500 eks	100,00
	3. Monitoring Pemilu dan pelantikan Pimpinan daerah	288.737.100,00	258.816.000,00	89,64	Jumlah fasilitasi Anggota DPRD yang dilantik secara sah	1 paket	1 paket	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.410.423.927,00</b>	<b>36.377.531.717,00</b>	<b>94,71</b>				

Dapat dilihat dari tabel pelaksanaan program dan kegiatan diatas bahwa sebagian besar realisasi kinerja program/kegiatan sangat baik dimana tercapai 90% atau lebih. Namun demikian ada beberapa realisasi program dan kegiatan yang belum mencapai target. Permasalahan dan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, sebagaimana uraian berikut :

a. Permasalahan

1. Kegiatan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan Terealisasi 85.90 % dengan capaian pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan yang difasilitasi sebanyak 591 kali dari target 688 kali. Hal ini disebabkan karena anggota DPRD Kabupaten Sampang pada tahun ini banyak melakukan kegiatan di luar kantor bersama konstituennya untuk persiapan pemilihan legislatif sehingga mengurangi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat kedewan.
2. Kegiatan Fasilitasi Layanan Aspirasi Masyarakat terealisasi 75 % dengan capaian 2 kali pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (RESES) dan 20 kali pelaksanaan fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Anggota DPRD dari target capaian 3 kali pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (RESES) dan 24 kali pelaksanaan fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh

Anggota DPRD hal ini disebabkan adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161/2389/OTDA tanggal 22 April 2019 bahwa pada masa persidangan terakhir pada periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan atau tidak dilaksanakan sehingga pelaksanaan Reses Anggota DPRD tahun 2019 yang seharusnya 3 kali hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Sementara pelaksanaan fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Anggota DPRD tidak mencapai target karena Kegiatan tersebut bersifat situasional dan menyesuaikan dengan permintaan masyarakat melalui surat permohonan.

b. Solusi

1. Mengevaluasi dan merencanakan dengan baik dalam setiap penetapan anggaran dan target kegiatan.
2. Memperbaiki dan meningkatkan Kualitas pelayanan fasilitasi kepada Anggota DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat.

**Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 memuat 6 program dan 19 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020**

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:											
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		1. Nilai IKM Sekretariat DPRD		80		75	76,73	102,31	77,67	154,4	193
	Sasaran:											
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD		1 Nilai IKM Sekretariat DPRD		80		75	76,73	102,31	77,67	189,09	189,09
4.05.		NON URUSAN										
4,05,405,04,26,		Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	%	100	100	91,93	91,93	97,16	189,09	189,09
			2	Persentase penyelegaraan alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	%	100	100	75	75,00	100	175	175
			3	Persentase Fasilitasi Aspirasi yang terlayani	%	100	100	100	100	100	200	200

4,05,405,04,26,01		kegiatan fasilitasi rapat dan risalah DPRD	1	Jumlah Sidang Paripurna	Kali	245		49	48	97,96	44	92	37,55
			2	Jumlah rapat-rapat AKD	kali	2002		688	591	85,90	249	840	41,96
4,05,405,04,26,02		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah Bintek AKD	Kali	30		6	6	100	6	12	40,00
			2	Jumlah Study Banding AKD	kali	70		14	13	92,86	14	27	38,57
4,05,405,04,26,03		Fasilitasi Jaring Aspirasi Masyarakat	1	Jumlah penjarangan aspirasi masyarakat	Kali	15		3	2	66,67	3	5	33,33
			2	Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD	Kali	132		24	20	83,33	24	44	33,33
<b>4,05,405,04,28,</b>		<b>Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase perda yang difasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>97,68</b>	97,68	<b>97,68</b>	<b>195,36</b>	<b>195,36</b>
4,05,405,04,28,01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah fasilitasi penyusunan perda	Kali	29		3	3	100	4	7	24,14
			2	Jumlah sosialisasi Perda pada masyarakat	kali	29		9	9	100	0	9	31,03
4,05,405,04,28,02		Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	Kali	60		n/a	n/a	0	12	12	20,00
4,05,405,04,28,03		Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD	1	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	kali	720		144	99	68,75	144	243	33,75
4,05,405,04,28,04		Monitoring pilkada dan pelantikan pimpinan daerah	1	jumlah fasilitasi Anggota DPRD yang dilantik secara sah	Kali	45		45	45	100	0	45	100,00
<b>4.01.4.01.01.01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>96,25</b>	96,25	<b>93</b>	<b>189,25</b>	<b>189,25</b>
4.01.4.01.01.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	32.500		5000	4590	91,80	1778	6368	19,59
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	72		12	12	100	12	24	33,33
			3	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	180		30	28	93,33	28	56	31,11
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	72		12	8	66,67	12	20	27,78



			5	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	ob	72		12	12	100	12	24	33,33
			6	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	54		9	9	100	9	18	33,33
			7	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	ok	4.090		420	420	100	420	840	20,54
			8	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman kegiatan	ok	9.400		1450	1450	100	1271	2721	28,95
			9	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	ok	73.548		12258	12258	100	12258	24516	33,33
			10	Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	bln	72		12	12	100	12	24	33,33
4.01.4.01.01.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	jenis	289		46	45	97,83	45	90	31,14
			2	Jumlah barang cetakan	jenis	6.510		1110	1110	100	1114	2224	34,16
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	999.800		179800	178454	99,25	178829	357283	35,74
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	140		25	25	100	24	49	35,00
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	215		40	40	100	40	80	37,21
4.01.4.01.01.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	5.706		1564	1564	100	927	2491	43,66
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	ok	7.516		1562	1562	100	1084	2646	35,20
<b>4.01.4.01.01.02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	100	100	100	<b>200</b>	<b>200,00</b>
4.01.4.01.01.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	1		0	0	0	0	0	0,00
			2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	30		6	6	100,00	6	12	40,00
4.01.4.01.01.02.02.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah dinas yang dibangun	unit	-		0	0	0	0	0	0,00
			2	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	unit	12		2	2	100	2	4	33,33

4.01.4.01.01.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	1		0	2	0	0	2	200,00
			2	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	4		0	0	0	0	0	0,00
			3	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	60		10	10	100	10	20	33,33
4.01.4.01.01.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	28		6	6	100	6	12	42,86
			2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit / jenis	376		58	0	0,00	99	99	26,33
			3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	12		5	5	100	0	5	41,67
			4	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	jenis	18		3	3	100	0	3	16,67
			5	Jumlah komputer yang diadakan	unit	12		5	5	100	1	6	50,00
			6	Jumlah printer yang diadakan	unit	8		0	0	0	0	0	0,00
			7	Jumlah meubelair yang diadakan	unit	6		0	0	0	3	3	50,00
			8	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	260		30	30	100	30	60	23,08
4.01.4.01.01.02.07.		Pengadaan Pakaian Dinas	1	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	stel	1.620		270	270	100	360	630	38,89
<b>4.01.4.01.01.03.</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>
4.01.4.01.01.03.01.		Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	ASN	67		10	10	100	10	20	29,85
<b>4.01.4.01.01.04.</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>
4.01.4.01.01.04.01.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	36		6	6	100	6	12	33,33

4.01.4.01.01.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	24		4	4	100	4	<b>8</b>	<b>33,33</b>
4.01.4.01.01.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok	6		1	1	100	1	<b>2</b>	<b>33,33</b>
			2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	6		1	1	100	1	<b>2</b>	<b>33,33</b>

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra Sekretariat DPRD adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai realisasinya hanya dari Tahun 2019 saja;
2. Target program dan kegiatan Tahun 2020 adalah target Renja Tahun 2020 (bukan setelah perubahan);
3. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.

### Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Nilai IKM Sekretariat DPRD			-		75	76	77		76,73	77,67	77	Tercapai

Berdasarkan pada tabel di atas capaian kinerja terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sudah tercapai yaitu nilai IKM Sekretariat DPRD melebihi target yang ditetapkan sebesar 76.00 dengan realisasi sebesar 77.67 atau persentase capaian kinerja 102.19 % Atau katagori SANGAT BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indeks tersebut dilakukan mealui metode penyebaran kuesioner kepada 30 Anggota DPRD sebagai responden. Survey ini dilaksanan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme, prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Kewajaran Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi pelaksana Pelayanan
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan

Walaupun mendapatkan persepsi SANGAT BAIK dari Anggota DPRD Kabupaten Sampang, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindaklanjut. Oleh karena itu disampaikan saran dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sampang, antara lain:

1. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima maka diperlukan komitmen yang kuat oleh pengambil keputusan dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.
2. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan/berkesinambungan.
3. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

### **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang**

Sebagaimana termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
2. Kuantitas dan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD masih kurang memadai;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD belum Optimal;

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang sederhana dan prima;
- 3 Terjalannya hubungan yang harmonis antara sekretariat DPRD dengan DPRD
- 4 Pesatnya Perkembangan teknologi dan informasi.

### **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.04.	SEKRETARIAT DPRD				18.285.451.250,00	SEKRETARIAT DPRD				23.000.987.450,00
4.05.	NON URUSAN				6.513.463.250,00	NON URUSAN				7.303.672.750,00
4.05.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	4.915.159.250,00	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	5.686.898.750,00
4.05.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah Surat Terkirim	5000 surat	1.433.583.000,00	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah Surat Terkirim	5000 surat	1.496.107.000,00
			Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	12 bulan	-			Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	12 bulan	-
			cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, telpon dan internet	12 bulan	-			cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, telpon dan internet	12 bulan	-
			Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	12 bulan	-			Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	12 bulan	-
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	-			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	-
			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	30 unit	-			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	30 unit	-
			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	12 bulan	-			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	12 bulan	-
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	12258 org	-			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	12258 org	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman kegiatan	1500 org	-			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman kegiatan	1500 org	-
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	750 org	-			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	750 org	-
4.05.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah Alat Tulis Kantor	46 jenis	371.109.250,00	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah Alat Tulis Kantor	46 jenis	419.221.750,00
			Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	-			Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	-
			Jumlah barang cetakan	1000 jenis buah	-			Jumlah barang cetakan	1000 jenis buah	-
			Jumlah barang penggandaan	150000 lembar	-			Jumlah barang penggandaan	150000 lembar	-
			Jumlah komponen instalasi listrik	20 jenis	-			Jumlah komponen instalasi listrik	20 jenis	-
			Jumlah spanduk/umbul-umbul/benda ra yang disediakan	3 jenis	-			Jumlah spanduk/umbul-umbul/benda ra yang disediakan	3 jenis	-
4.05.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah Sampang	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang diikuti	750 Org kali	3.110.467.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah Sampang	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang diikuti	750 Org kali	3.771.570.000,00
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang diikuti	1150 Org kali	-			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang diikuti	1150 Org kali	-
<b>4.05.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.255.520.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.274.370.000,00</b>
4.05.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD			294.600.000,00	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD			342.100.000,00
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	-			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	-
4.05.02.02.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan rumah jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	2 gedung	75.500.000,00	Pembangunan/rehab/pemeliharaan rumah jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	2 gedung	75.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	Sekretariat DPRD			336.600.000,00	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	Sekretariat DPRD			436.000.000,00
			Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	10 unit	-			Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	10 unit	-
4.05.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 unit	174.270.000,00	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 unit	163.220.000,00
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	58 unit	-			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	58 unit	-
4.05.02.07.	Pengadaan pakaian dinas	Sekretariat DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	377 stel	374.550.000,00	Pengadaan pakaian dinas	Sekretariat DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	377 stel	257.550.000,00
<b>4.05.03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>295.975.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>295.975.000,00</b>
4.05.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Sekretariat DPRD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	10 ASN	295.975.000,00	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Sekretariat DPRD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	10 ASN	295.975.000,00
<b>4.05.04.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>46.809.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>46.429.000,00</b>
4.05.04.01.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	13.986.000,00	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 Dok	13.986.000,00
4.05.04.02.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok	17.987.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok	14.836.000,00
4.05.04.03.	Peningkatan pelayanan informasi publik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	17.987.000,00	Peningkatan pelayanan informasi publik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	17.607.000,00
			Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali	-			Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 kali	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				11.771.988.000,00	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				15.697.314.700,00
4.05.04.4.05.26.	Program Fasilitas Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Fasilitas Aspirasi masyarakat yang terlayani	100.00 %	9.745.700.000,00	Program Fasilitas Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Fasilitas Aspirasi masyarakat yang terlayani	100.00 %	13.457.884.700,00
			Persentase fasilitas peningkatan kapasitas Anggota DPRD	100.00 %				Persentase fasilitas peningkatan kapasitas Anggota DPRD	100.00 %	
			Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	100.00 %				Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	100.00 %	
4.05.04.4.05.26.01.	Fasilitasi rapat dan risalah DPRD	Sampang dan Luar Sampang	Jumlah Sidang Paripurna	49 kali	1.410.354.000,00	Fasilitasi rapat dan risalah DPRD	Sampang dan Luar Sampang	Jumlah Sidang Paripurna	49 kali	1.661.590.000,00
			Jumlah rapat-rapat AKD	300 kali	-			Jumlah rapat-rapat AKD	300 kali	-
4.05.04.4.05.26.02.	Fasilitasi peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan	Jatim dan Luar Jatim	Jumlah Bintek AKD	6 kali	6.779.346.000,00	Fasilitasi peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan	Jatim dan Luar Jatim	Jumlah Bintek AKD	6 kali	10.381.493.900,00
			Jumlah Study Banding AKD	32 kali	-			Jumlah Study Banding AKD	32 kali	-
4.05.04.4.05.26.03.	Fasilitasi layanan aspirasi masyarakat	Kabupaten Sampang	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	3 kali	1.556.000.000,00	Fasilitasi layanan aspirasi masyarakat	Kabupaten Sampang	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	3 kali	1.414.800.800,00
			Jumlah Fasilitas dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD	26 kali	-			Jumlah Fasilitas dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD	26 kali	-
4.05.04.4.05.28.	Program Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase perda yang difasilitasi	100.00 %	2.026.288.000,00	Program Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase perda yang difasilitasi	100.00 %	2.239.430.000,00
4.05.04.4.05.28.01.	Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah fasilitas penyusunan perda	4 Perda	1.289.508.000,00	Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah fasilitas penyusunan perda	4 Perda	1.319.630.000,00
			Jumlah sosialisasi Perda pada masyarakat	4 perda	-			Jumlah sosialisasi Perda pada masyarakat	4 perda	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.04.4.05.28.02.	Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	12 Perda dan Keputusan	112.200.000,00	Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	12 Perda dan Keputusan	152.000.000,00
4.05.04.4.05.28.03.	Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	144 kali	624.580.000,00	Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	144 kali	767.800.000,00

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan dari uraian indikator kinerja, target kinerja dan besaran anggarannya, menyesuaikan dengan kebutuhan Tahun 2021.

**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Sekretariat DPRD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan mendukung pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) Tahun 2021 dengan Tema **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata	<b>Prioritas 1:</b> Pemulihan ekonomi melalui penguatan sector unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
3	SDM berkualitas dan berdayasaing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelligence	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan ketahanan social masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar

4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan kepedulian social dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	<b>Prioritas 4:</b> Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	
7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	

Sumber : RKPД Kabupaten Sampang Tahun 2021

### Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
	<b>Tujuan:</b>		
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>Nilai IKM Sekretariat DPRD</b>	77
	<b>Sasaran:</b>		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Nilai IKM Sekretariat DPRD	77

## **Program dan Kegiatan**

### **a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Dalam merumuskan program kegiatan Sekretariat DPRD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Sekretariat DPRD mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu **Peningkatan kualitas pelayanan publik**. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

### **b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

untuk mendukung pada sasaran tersebut, pada awalnya Sekretariat DPRD menyusun 6 (enam) Program yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
- Program Fasilitas Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan Pemetaan dan penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dan menjadi 2 (dua) Program yaitu :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://sampangkab.sipd.kemendagri.go.id/>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sekretariat DPRD mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program-program Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluara nSub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
4	02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
4	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
4	02	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	2 dokumen	9 dok	4,003,009
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	1 dokumen	9 dok	2,248,043
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	1 dokumen	9 dok	2,240,113
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	1 dokumen	9 dok	2,240,113

4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	1 dokumen	9 dok	2,240,113
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	3 dokumen	9 dok	7,502,788
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3,181,048,349</b>
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	12 bln	100 %	3,109,841,728
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	1728 bh	100 %	61,953,520
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	50 dokumen	100 %	2,423,789
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	1 dokumen	100 %	2,095,681

4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 %	3 dokumen	100 %	4,733,631
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>90,000,000</b>
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	7 unit	1 Laporan	90,000,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>114,086,880</b>
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100 %	12 ok		114,086,880
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	552 bh	100 %	47,439,857
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1472 bh	100 %	140,810,325
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	865 explr 113000 lbr	100 %	70,033,650

4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	432 explr	100 %	62,640,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1440 ok	100 %	57,600,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	720 ok 32 ok	100 %	255,778,680
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>153,835,000</b>	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	5 unit	6 unit	153,835,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,100,068,000</b>	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang terkirim	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	100 %	5000 surat	100 %	27,998,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	100 %	12 bln	100 %	322,920,000

4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Umum Jumlah Honorarium Tenaga Caraka Jumlah Honorarium Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Honorarium Tenaga Operator Komputer Jumlah Honorarium Tenaga Supir	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	100 %	132 ob 204 ob 24 ob 12 ob 168 ob 12 ob 24 ob	100 %	749,150,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>795,480,000</b>	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan yang dipelihara Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	5 unit 5 unit	120 unit	352,600,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	10 unit 25 unit	120 unit	130,950,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	102 unit	120 unit	51,750,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	5 gedung	120 unit	260,180,000

4	02	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>							<b>33,058,418</b>
4	02	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Promosi Layanan Publik	Cakupan Pelayanan Penataan Organisasi	100 %	1 dokumen 2 kegiatan	100 %	33,058,418
4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							<b>23,565,718,697</b>
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dipenuhi	100 %	540 ob	100 %	23,108,968,697
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dipenuhi	100 %	225 stell	100 %	366,750,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Medical chek Up DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dipenuhi	100 %	45 org	100 %	90,000,000
4	02	01	2.16		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>							<b>444,135,500</b>
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang dipenuhi	100 %	12 kl	100 %	25,650,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang dipenuhi	100 %	39 kl	100 %	283,337,500

4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang dipenuhi	100 %	19543 buah	100 %	135,148,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						<b>18,205,230,340</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>						<b>2,646,745,540</b>	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	1 dokumen	100 %	180,648,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	13 dokumen	100 %	1,475,319,540
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	5 dokumen	100 %	180,648,000



4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Naskah Akademik	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	5 dokumen	100 %	375,000,000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan Tata Tertib DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	1 dokumen	100 %	435,130,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>								<b>1,922,474,000</b>
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	1 dokumen	100 %	217,464,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	1 dokumen	100 %	209,075,000

4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	1 dokumen	100 %	678,212,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	1 dokumen	100 %	209,075,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	1 dokumen	100 %	608,648,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							<b>3,400,326,500</b>
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	7 kl	100 %	807,480,000

4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	7 kl	100 %	783,386,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	7 kl	100 %	812,542,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	7 kl	100 %	783,386,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1 laporan	100 %	175,057,500

4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1 laporan	100 %	38,475,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>							<b>4,017,513,000</b>
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	6 kl	100 %	2,904,840,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	108 kl	100 %	678,198,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim ahli yang disediakan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	48 ob	100 %	121,200,000

4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	144 ob	100 %	288,000,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	1 dokumen	100 %	25,275,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>1,816,885,300</b>	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	34 kl	100 %	291,550,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	24 kl 3 kl	100 %	1,525,335,300
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>						<b>714,935,000</b>	

4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah kode etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	1 dokumen	100 %	353,423,000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	1 laporan	100 %	361,512,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>							<b>3,686,351,000</b>
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	6 kl	100 %	2,702,740,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	1 laporan	100 %	25,275,000

4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	24 kl	100 %	503,452,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	5 kl	100 %	454,884,000
											<b>TOTAL</b>	<b>48,337,437,875</b>

Pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD akan melaksanakan **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** dengan Jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **48,337,437,875,00** (DAU). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 2 program dan 18 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat DPRD dan lingkup Kabupaten Sampang.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**. Hasil evaluasi atas Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja program/kegiatan adalah 94,71 % atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Sekretariat DPRD adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”** yang didukung oleh satu sasaran yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun 2021, pada awalnya disusun sebanyak 6 (Enam) program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dan menjadi 2 (dua) program dengan 18 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **48,337,437,875,00** yang sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat DPRD dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI



# **LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2021**

**FORMAT PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
SESUAI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN										
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18						
SEKRETARIAT DPRD	4.05.															4	2										
	4.05.4.05.04.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	UNSUR SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	1	
	4.05.4.05.04.01.01.			Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Jumlah Surat Terkirim	5000	surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Administrasi Umum	Jumlah Surat Terkirim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	UNSUR SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	1	
					Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	12	bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	8	
					cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, telpon dan internet	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, telpon dan internet	Administrasi Umum	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, telpon dan internet	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	2	
					Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	12	bulan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	Administrasi Umum	Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	5	
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	9	macam	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	1	5	
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	30	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	0	6	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	12258	org	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	Administrasi Umum	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	1	3	
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	1500	org	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	Administrasi Umum	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2	0	1	2	0	3	1	3	



					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	58	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	3	2	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	3	4	
	4.05.4.05.04.02.07.			Pengadaan pakaian dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	377	stel	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2
	4.05.4.05.04.03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	UNSUR SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	0	0	2.0	0	1	
	4.05.4.05.04.03.01.			Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	10	ASN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	sda	sda	4	0	0	2.0	0	4	9
	4.05.4.05.04.04			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	UNSUR SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	0	0	2.0	0	3	1
	4.05.4.05.04.04.01.			Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6	dok	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	4
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	sda	sda	4	0	0	2.0	0	1	6
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	7

								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	<b>PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	0	9		
	4.05.4.05.04.04.02.			Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4	dok	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	<b>PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	0	1		
	4.05.4.05.04.04.03.			Peningkatan pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen SKM	1	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut	
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut	
	4.05.4.05.04.26			<b>Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang terlayani</b>	100	%					<b>Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang terlayani</b>	<b>UNSUR SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	4	0	0			2	3			
					<b>Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD</b>	100	%					<b>Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD</b>	<b>UNSUR SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	4	0	0			2	3			
					<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	100	%					<b>Program Layanan dan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	<b>UNSUR SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	4	0	0			2	2			
	4.05.4.05.04.26.01.			Fasilitasi rapat dan risalah DPRD	Jumlah Sidang Paripurna	49	kali	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Sidang Paripurna	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Sidang Paripurna	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	3	1	2	
					Jumlah rapat-rapat AKD	300	kali	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat-rapat AKD	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	3	1	2	
								Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat AKD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	3	2	1	
								Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah rapat-rapat AKD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<b>Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi</b>	sda	sda	4	0	0	2.0	0	2	3	2	2	

								Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat AKD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	sda	sda	4	0	0	2,0	0	3	
								Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat AKD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	sda	sda	4	0	0	2,0	0	4	
								Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah rapat-rapat AKD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	sda	sda	4	0	0	2,0	0	5	
								Penyediaan Tenaga ahli fraksi	Jumlah rapat-rapat AKD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah rapat-rapat AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	sda	sda	4	0	0	2,0	0	5	
	4.05.4.05.04.26.02.			Fasilitasi peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan	Jumlah Bintek AKD	6	kali	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bintek AKD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Bintek AKD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD	sda	sda	4	0	0	2,0	0	2	
					Jumlah Study Banding AKD	32	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut
								Pelaksanaan Medical check up DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				4	0	0	2,0	0	3	
	4.05.4.05.04.26.03.			Fasilitasi layanan aspirasi masyarakat	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	3	kali	Pelaksanaan Reses	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang terlayani	sda	sda	4	0	0	2,0	0	3	
					Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD	26	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut
	4.05.4.05.04.28			Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase perda yang difasilitasi	100	%					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang difasilitasi			4	0	0	2	3		
	4.05.4.05.04.28.01.			Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Jumlah fasilitasi penyusunan perda	4	perda	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan perda	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah fasilitasi penyusunan perda	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	sda	sda	sda	4	0	0	2,0	0	1	
								Pembahasan rancangan perda		Pembentukan Peraturan DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	sda	sda	sda	4	0	0	2,0	0	2	



							fasilitasi penyusunan Naskah Akademik		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	0		
					Jumlah sosialisasi Perda Inisiatif pada masyarakat	4	perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat sub kegiatan yang sepadan dengan indikator tersebut
	4.05.4.05.04.28.02.			Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Daerah, Pwratutran DPRD dan Keputusan DPRD yang di kaji	0	perda	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah, Pwratutran DPRD dan Keputusan DPRD yang di kaji	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Peraturan Daerah, Pwratutran DPRD dan Keputusan DPRD yang di kaji	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	0	
	4.05.4.05.04.28.03.			Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	144	kali	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	sda	sda	sda	sda	4	0	0	2.0	0	





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1472 bh	100 %	140,810,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	865 explr 113000 lbr	100 %	70,033,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	432 explr	100 %	62,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	65,009,450
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1440 ok	100 %	57,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	720 ok 32 ok	100 %	255,778,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	300,000,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>153,835,000</b>					<b>0</b>	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	6 unit	153,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,100,068,000</b>					<b>1,174,745,000</b>	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang terkirim	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5000 surat	100 %	27,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bln	100 %	322,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	364,320,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Umum Jumlah Honorarium Tenaga Caraka Jumlah Honorarium Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Honorarium Tenaga Operator Komputer Jumlah Honorarium Tenaga Supir	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	132 ob 204 ob 24 ob 12 ob 168 ob 12 ob 24 ob	100 %	749,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	775,425,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>795,480,000</b>						<b>916,700,000</b>
4	02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan yang dipelihara Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit 5 unit	120 unit	352,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	400,000,000
4	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit 25 unit	120 unit	130,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,950,000
4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	102 unit	120 unit	51,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,750,000
4	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 gedung	120 unit	260,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>			<b>Penataan Organisasi</b>								<b>33,058,418</b>					<b>33,058,418</b>
4	02	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Promosi Layanan Publik	Cakupan Pelayanan Penataan Organisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 2 kegiatan	100 %	33,058,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	33,058,418
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>			<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>								<b>23,565,718,697</b>					<b>24,525,598,697</b>
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dipenuhi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	540 ob	100 %	23,108,968,697			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	24,068,848,697



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 %	180,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	215,872,800
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Naskah Akademik	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 %	375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	375,000,000
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan Tata Tertib DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	435,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	298,581,800
<b>4 02 02 2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							<b>1,922,474,000</b>						<b>2,117,032,000</b>
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	217,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	220,583,000
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	209,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	209,075,000
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	678,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	834,187,000





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	175,057,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	206,687,500
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	38,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	38,475,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>								<b>4,017,513,000</b>					<b>4,378,056,000</b>
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kl	100 %	2,904,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	3,034,999,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	108 kl	100 %	678,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	725,670,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim ahli yang disediakan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 ob	100 %	121,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	121,200,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 ob	100 %	288,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	468,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	25,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	28,187,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								<b>1,816,885,300</b>		<b>1,816,885,300</b>			
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 kl	100 %	291,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	291,550,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	24 kl 3 kl	100 %	1,525,335,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	1,525,335,300
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>								<b>714,935,000</b>		<b>748,423,000</b>			
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah kode etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	353,423,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	353,423,000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	361,512,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	395,000,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>								<b>3,686,351,000</b>		<b>4,235,208,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sampang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kl	100 %	2,702,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	3,288,890,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	25,275,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	28,188,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 kl	100 %	503,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	597,270,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kl	100 %	454,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a. persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi; b. persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c. persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d. persentase perda yg di fasilitasi	100 %	320,860,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								<b>0</b>			<b>1,926,760,000</b>		
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								<b>0</b>			<b>1,926,760,000</b>		
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		jumlah kunjungan kerja DPRD ke dalam daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 kl			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				370,480,000
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat		Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kl			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,556,280,000
<b>TOTAL</b>												<b>48,337,437,875</b>			<b>53,613,830,452</b>			